

JURNAL

LEGALITAS AKTA NOTARIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI



**Diajukan oleh :
David**

**N P M : 100510385
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**LEGALITAS AKTA NOTARIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI
MEDIA TELEKONFERENSI**



Diajukan oleh :
David

N P M : 100510385
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Dosen Pembimbing

DR. Ig. Sumarsono Raharjo, SH. M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

- I Judul : Legalitas Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonferensi
- II Nama : David, Ig. Sumarsono Raharjo
- III Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- IV Abstract, This thesis writing is entitled The Notary's Official Document Legality of Stockholder General Meeting through Teleconference Media using problem formulations Is the presence of Notary in the making of RUPS Official Report through teleconference can be generalized with the presence of a Notary physically and How is the implementation of Official Report of Stockholder General Meeting through teleconference media to possess legality as authentic official document. The law material utilized in this research was primary and secondary law material. The primary law material was collected by analyzing law regulations relevant to this research. The secondary material was collected through literary study and interview towards sources, which were Notary Wahyu Wiryono, S.H in Yogyakarta and Notary Habib Adjie, S.H M.Hum in Surabaya. The physical presence of Notaries in making Meeting Official Report through Teleconference based on law preference of "Lex Specialis Derogat Legi Generali" caused meaning displacement from the word "must present physically" on the explanation of Article Number 16 paragraph (1) letter 1 Act Number 30 Year 2004 on Notary Function to be facilitated by other media such as electronic, especially RUPS done in teleconference on Article 77 paragraph (1) Act Number 40 Year 2007 on Limited Company. The implementation of Stockholder General Meeting Official Report through teleconference done as in general making of Stockholder General Meeting Official Report, however the participation of Notary through teleconference and on the beginning of Official Document must be explained that RUPS was done through teleconference.

Keywords: Meeting Official Report, Notary, Stockholder General Meeting, Teleconference

V Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menjadi landasan filosofis dalam lahirnya Akta Notaris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta . Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kebutuhan akan Akta Notaris semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Kebutuhan akan Akta Notaris untuk menjamin kepastian hukum juga diperlukan oleh Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum buatan (*artificial legal entity*) dalam melakukan perbuatan hukum.

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum buatan tidak memiliki kelengkapan diri untuk dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga Perseroan Terbatas harus didukung organ-organ yang dapat mendukung fungsi badan hukum. Organ-organ Perseroan Terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Organ Perseroan Terbatas berupa Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan melakukan pertemuan fisik secara langsung para peserta Rapat Umum Pemegang Saham dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung para peserta Rapat Umum Pemegang Saham, namun dimungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat seperti menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi disyaratkan untuk membuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), namun risalah RUPS yang telah dibuat dengan Akta Notaris tidak disyaratkan untuk ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pembuatan Akta Notaris dalam pelaksanaannya RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaitu Akta yang dibuat langsung oleh notaris dalam bentuk Akta Berita Acara atau Akta Relaas (*ambtelijke akten*) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*). Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*), maka pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dilakukan dengan memberi kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*) tidak memiliki permasalahan yang muncul karena pembuatan Akta Notaris dilakukan secara konvensional.

Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Berita Acara atau Akta Relaas (*ambtelijke akten*), maka notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS guna mencatat segala perbuatan hukum yang terjadi atas suatu keadaan yang didengar, dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri ke dalam Akta Berita Acara. Permasalahan yang muncul dalam pembuatan akta Berita Acara atau Akta Relaas (*ambtelijke akten*) pada RUPS melalui telekonferensi adalah Notaris dalam pembuatan akta Acara Berita RUPS tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung kepada para peserta Rapat Umum Pemegang Saham karena RUPS diadakan melalui telekonferensi. Pasal 16 ayat (1) huruf 1 *juncto* Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bahwa Notaris harus hadir secara fisik dalam membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan

menandatangani akta di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tidak dipenuhi maka Akta Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

VI Isi makalah

1. Tinjauan Mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

a. Pengertian RUPS

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham (*shareholder*) perseroan, dan sarana baginya untuk menyalurkan aspirasi kepentingannya di dalam perseroan.

b. Kedudukan dan Kewenangan RUPS

Menurut Misahardi Wilamarta dalam struktur Perseroan Terbatas RUPS mempunyai kekuasaan yang tertinggi, tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS memiliki jenjang tertinggi diantara organ perseroan, tetapi sekedar mempunyai kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain. Jadi masing-masing organ perseroan mempunyai tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.

RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, kewenangan tersebut berkaitan dengan :

- 1) Penetapan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19 ayat (1))
- 2) Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya (Pasal 38 ayat (1))
- 3) Penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1))
- 4) Pengurangan modal perseroan (Pasal 44)
- 5) Persetujuan rencana kerja tahunan (Pasal 64 ayat (2))
- 6) Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan (Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2))
- 7) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris (Pasal 69 ayat (1))
- 8) Penetapan penggunaan laba (Pasal 71)
- 9) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris (Pasal 94, 105, 111)
- 10) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, (Pasal 105) dan
- 11) Penetapan pembubaran perseroan (Pasal 123).

c. Pemanggilan RUPS

Pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan RUPS yaitu:

- 1) Direksi
- 2) Dewan Komisaris
- 3) Pemegang Saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri

d. Kuorum dalam RUPS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah diklarifikasi syarat kuantitas kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan bagi setiap agenda atau mata acara RUPS seperti berikut :

- 1) Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS mengenai mata acara biasa, diatur pada Pasal 86:
 - a) kuorum kehadiran $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili;
 - b) selanjutnya menurut Pasal 87 ayat (2), keputusan sah, jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- 2) Syarat kuorum dan pengambilan keputusan RUPS untuk jenis mata acara atau agenda “perubahan” Anggaran Dasar, diatur pada Pasal 88, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) syarat kuorum kehadiran, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili, dan
 - b) keputusan sah, jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- 3) Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS mengenai mata acara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan, merujuk pada Pasal 89 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) syarat kuorum kehadiran, paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili,
 - b) keputusan sah, apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Semua keputusan RUPS harus didasarkan pada musyawarah untuk mufakat seperti yang ditegaskan dalam Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

e. RUPS Melalui Media Elektronik

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat

2. Kehadiran Notaris Dalam Pembuatan Akta Berita Acara RUPS Melalui Telekonferensi Dapat Disamakan Dengan Kehadiran Notaris Secara Fisik.

a. Notaris

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan pada asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik yaitu asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan,

larangan penyalahgunaan wewenang, larangan bertindak sewenang-wenang, asas proporsionalitas, asas profesionalitas.

DR. Herlien Budiono, S.H. yang ditulis pada majalah Renvoi bulan September Tahun 2005, bahwa notaris mempunyai dua kewenangan dalam pembuatan akta otentik yaitu :

1) Menjalankan tugas perundang-undangan;

Menjalankan tugas perundang-undangan adalah tugas utama dari notaris yaitu pembuatan akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris .

2) Menjalankan tugas diluar tugas perundang-undangan.

Komar Andasasmita menyatakan bahwa selain tugas utama membuat akta otentik, sehari-harinya notaris melaksanakan tugas lainnya, yaitu:

- a) Bertindak selaku penasehat hukum, terutama yang menyangkut masalah hukum perdata;
- b) Mendaftarkan akta-akta/surat dibawah tangan (*stukken*), melakukan "*waarmeking*";
- c) Melegalisir tanda tangan;
- d) Membuat dan mensahkan (*waarmerken*) salinan/turunan berbagai dokumen;
- e) Mengusahakan disahkannya badan-badan, seperti perseroan terbatas dan perkumpulan, agar memperoleh persetujuan/ pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman;
- f) Membuat keterangan hak waris (dibawah tangan), dan;
- g) Pekerjaan-pekerjaan lain yang bertalian dengan lapangan yuridis dan perpajakan, seperti urusan bea materai dan sebagainya .

b. Akta Berita Acara RUPS Melalui Telekonferensi

Akta Berita Acara RUPS melalui media telekonferensi merupakan Akta otentik yang dibuat oleh Notaris (pejabat umum) disebut dengan akta relaas (*relaas acten*) atau Akta Berita Acara yang berisi uraian yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan oleh dan atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris.

Akta Berita Acara RUPS sebagai akta otentik merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata yaitu alat bukti tertulis yang termasuk pada alat bukti tertulis otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1870 KUH Perdata), sehingga Akta Berita Acara RUPS harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut, walaupun demikian Akta Berita Acara RUPS sebagai akta otentik masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.

Akta Berita Acara RUPS melalui media telekonferensi sebagai akta otentik dapat dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian yakni:

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige bewijskracht*)
- 2) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*)
- 3) Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).

Notaris dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS Melalui media telekonferensi sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat pembentukan akta otentik yang terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang (Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
- 2) Ketentuan Penghadap dan Saksi yang menghadap Notaris diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 3) Hal-hal yang harus dicantumkan dalam Akta Notaris (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)
- 4) Notaris Membacakan Akta di Hadapan Para Penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).
- 5) Ditandatangani Semua Pihak (Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
- 6) Pembacaan, Penerjemahan atau Penjelasan dan Penandatanganan Pada Akhir Akta (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)

VII Kesimpulan

Kehadirat secara fisik Notaris dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat ditinjau secara yuridist memiliki ketidak harmonisasi antara Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berlakunya asas preferensi hukum “Lex Specialis Derogat Legi Generali” mengakibatkan terjadi pergeseran arti dari kata menghadap yang “harus secara fisik” pada Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi difasilitasi oleh media lain secara elektronik, khususnya RUPS yang dilakukan secara telekonferensi pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga ketentuan Pasal 16 ayat (8) tidak berlaku dan Akta Berita Acara RUPS melalui media telekonferensi tetap menjadi akta otentik.

Mekanisme pembuatan Akta Berita Acara RUPS melalui telekonferensi oleh Notaris dilakukan dengan keikutsertaan Notaris melalui media telekonferensi sejak awal hingga berakhirnya RUPS yang didasarkan pada undangan dari direksi dan wilayah Jabatan Notaris. Notaris harus membacakan sendiri Akta yang dibuatnya pada diseluruh peserta RUPS melalui telekonferensi. Setelah akta dibacakan oleh Notaris, maka Akta Berita Acara RUPS harus ditandatangani oleh Notaris secara langsung sesuai dengan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta Berita Acara RUPS ini yang kemudian digunakan oleh perseroan untuk disetujui atau dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Pada awal Akta harus dijelaskan bahwa RUPS dilakukan melalui telekonferensi. Notaris wajib menerangkan dalam Akta Berita Acara jika terdapat peserta yang meninggalkan rapat pada saat rapat berlangsung dengan menguraikan berbagai alasan. Syarat tempat dan waktu tertentu dapat disamakan dengan tanggal pelaksanaan RUPS dan Pasa 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

VIII Daftar Pustaka

Buku-buku :

Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta.

Dhanta Rizky, 2010, Kamus Istilah Komputer, Grafis dan Internet, Indah, Jakarta.

G.H.S.Lumbang Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.

Habib Adjie, 2011, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Cetakan ketiga, Perseroan Terbatas Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2009, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan, CV. Mandar Maju, Bandung.

Herlien Budiono, 2005, “Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat, dan Pasar)”, Renvoi (September 2005).

Herry Susanto, 2010, Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak, Cetakan Pertama, FH.UII PRESS, Yogyakarta

Johny Ibrahim, 2012, Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan keenam, Bayumedia Publishing, Malang.

Komar Andasasmita, 1983, Notaris Selayang Pandang, (Bandung:Alumni), Bandung.

M.Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Mulyoto, 2010, Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas, Cakrawalan Media, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Ridwan Khairandy, 2009, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi, Edisi Revisi, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta.

Sudarsono, 1999, Kamus Hukum, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, tanggal 3 Mei 2004, Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi Nomor 12.

Stefanus Mahendra Soni Indriyo, 2012, Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,.

Tan Thong Kie, 2007, Studi Notaris Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris, Cetakan Pertama, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Tri Budiyo, 2010, Hukum Perusahaan, Cetakan Pertama, Griya Media, Salatiga.

Website:

www.muhammadrizalrustam.wordpress.com,.Muhammadrizalrustam,
muhammadrizalrustam, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Telekonferensi, 1
Oktober 2013.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

